



# **MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI**

**Dr. Fajar Laksono Suroso**

GAGASAN  
*CONSTITUTIONAL  
JUDICIAL REVIEW*

GAGASAN  
PELEMBAGAAN MK

PENGENALAN GAGASAN  
*JUDICIAL REVIEW* DALAM  
PERUMUSAN UUD 1945

ADOPSI GAGASAN  
*CONSTITUTIONAL  
JUDICIAL REVIEW* DALAM  
PERUBAHAN UUD 1945

**THE MIDNIGHT  
JUDGES, AS  
(1803)**

**MK  
AUSTRIA  
(1920)**

**USULAN YAMIN  
DI BPUPKI  
(1945)**

**PERUBAHAN  
UUD 1945  
(1999-2002)**

MPR

DPR

DPA

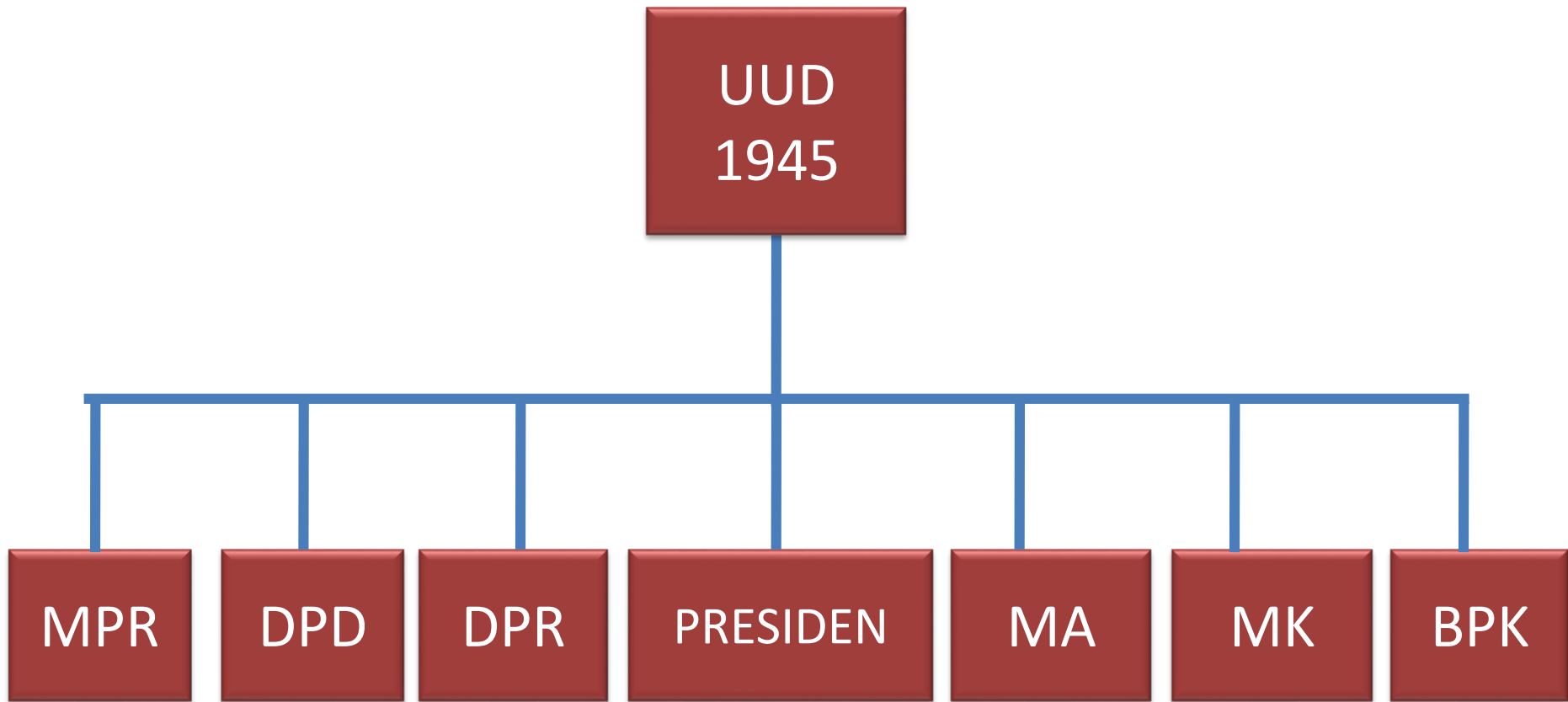
PRESIDEN

MA

BPK

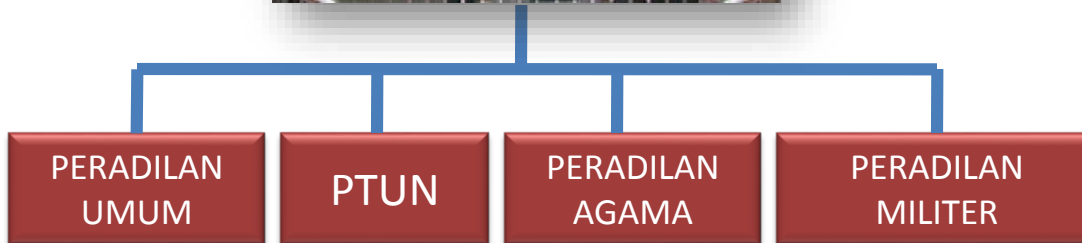


**KELEMBAGAAN NEGARA SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945**



**KELEMBAGAAN NEGARA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945**

# PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN



- Peradilan konstitusi
- Wewenang terbatas
- Tidak menjatuhkan sanksi: denda, penjara, dll
- *Judicial review* UU terhadap UUD
- Peradilan tunggal
- Putusan bersifat final

- Peradilan pidana, perdata, TUN, dan militer
- Sengketa antar subyek hukum
- Menjatuhkan sanksi: denda, penjara, dll
- Peradilan berjenjang: Banding, Kasasi, PK
- *Judicial review* peraturan perundang-undangan di bawah UU

# KEWENANGAN MK

**MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN  
LEMBAGA NEGARA YANG  
KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UUD**

**MEMUTUS PEMBUBARAN  
PARTAI POLITIK**

**MENGUJI UU  
TERHADAP UUD**

**MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL  
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**MEMBERI PUTUSAN ATAS DUGAAN  
DPR BAHWA PRESIDEN/WAKIL  
PRESIDEN MELANGGAR UUD**

# HAKIM MK [9 orang]

Pasal 24C ayat (3) UUD 1945

MAHKAMAH  
AGUNG

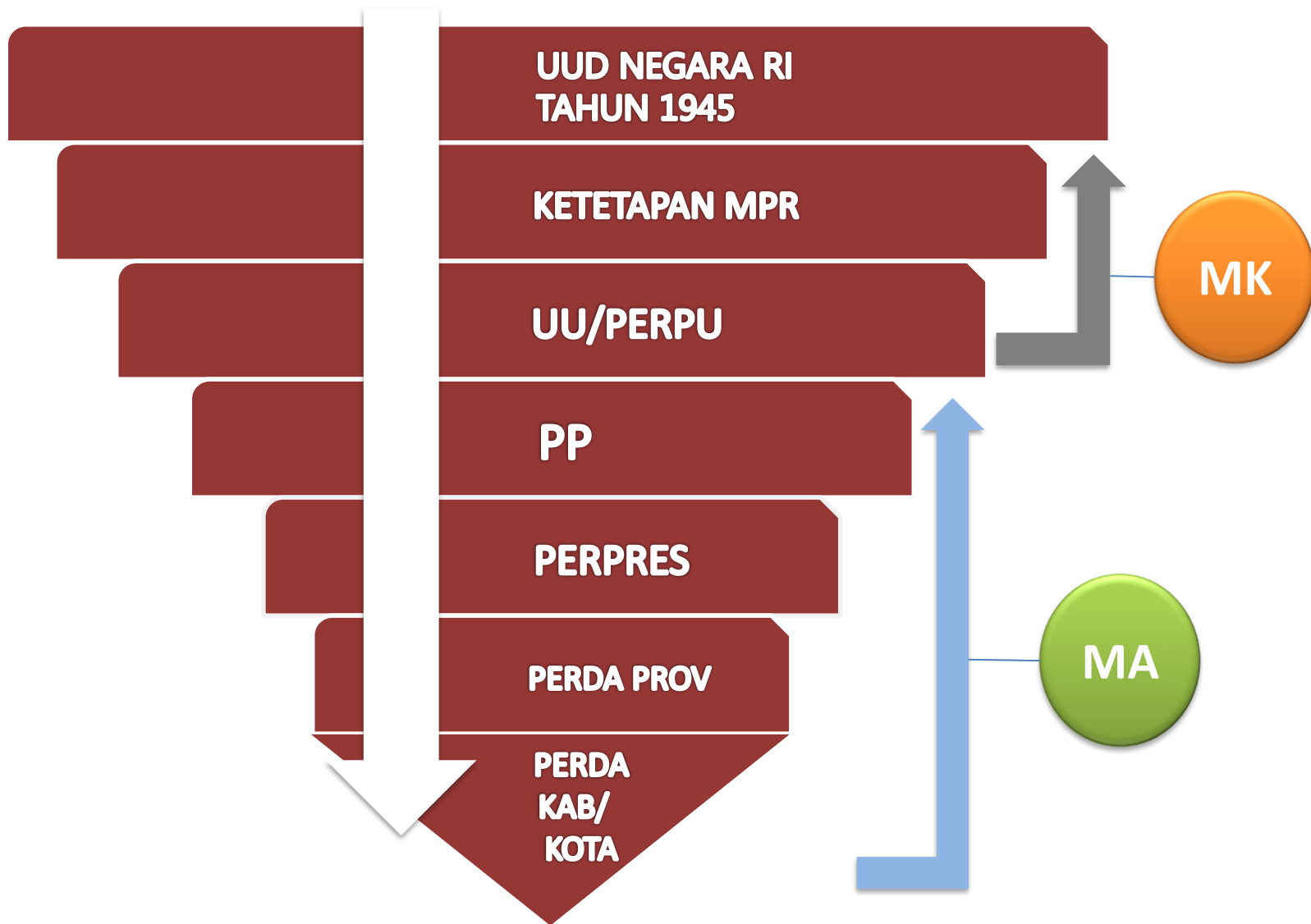


PRESIDEN



DPR





**PASAL 7 UU 12/2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



NO	UNDANG-UNDANG	ISTILAH
1	UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Perselisihan tentang hasil pemilu
2	UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Keberatan terhadap penetapan hasil pemilu
3	UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Perselisihan tentang hasil pemilu
4	UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Keberatan terhadap penetapan hasil pemilu
5	UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Perselisihan tentang hasil pemilu
6	UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Sengketa hasil penghitungan suara
7	UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Keberatan terhadap penetapan hasil pemilu
8	UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman	Perselisihan tentang hasil pemilu
9	UU Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Perselisihan tentang hasil pemilu
10	UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.	Perselisihan tentang hasil pemilu
11	UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Perselisihan tentang hasil pemilu

## JUMLAH PERKARA DIREGISTRASI (2003-2018)

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH PERKARA	PERSENTASE
1	Pengujian UU	1.236	46%
2	PHP Kada	982	37%
3	PHPU	414	16%
4	SKLN	25	1%
<b>JML</b>		<b>2.657</b>	<b>100%</b>

**JUMLAH PUTUSAN PERKARA  
PUU BERDASAR AMAR**

<b>NO</b>	<b>AMAR</b>	<b>JUMLAH PUTUSAN</b>
1	Dikabulkan	259
2	Ditolak	420
3	Tidak Dapat Diterima	375
4	Gugur	21
5	Ditarik Kembali	115
6	MK Tidak Berwenang Memeriksa	9
<b>JML</b>		<b>1.199</b>

# ASAS-ASAS HUKUM ACARA MK

**1. INDEPENDEN DAN IMPARSIAL**

**2. *IUS CURIA NOVIT***

**3. PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM**

**4. PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN TANPA BIAYA**

**5. *AUDI ET ALTERAM PARTEM***

**6. HAKIM AKTIF DALAM PERSIDANGAN**

**7. *PRESUMTIO IUSTEAE CAUSA***



# PERSIDANGAN

